PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendayagunaan Aparatur Negara menjadi salah satu bidang pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah bahwa pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berbagai penilaian negatif terhadap birokrasi tidak hanya muncul dari dalam negeri, tetapi juga dari lingkungan global yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia terutama sektor perkonomian. Indikasi ini ditunjukkan dengan penilaian yang menempatkan posisi Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan posisi negara-negara lain dalam lingkup global. Birokrasi pemerintah dipandang tidak efisien, banyak diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak mampu memberikan kebijakan yang memfasilitasi serta lambat memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor swasta.

Untuk merespon berbagai permasalahan di atas, pemerintah pada tahun 2010 – 2014 menempatkan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas utama pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2010 – 2014. Peletakan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintah pada prioritas pertama tampaknya karena pemerintah memandang bahwa birokrasi menjadi kunci keberhasilan peningkatan kinerja pemerintah. Birokrasi memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan governance. Peran birokrasi dalam kaitan ini adalah membangun tradisi dan institusi yang melaksanakan kewenangan melalui proses politik pemilihan pemerintahan, perumusan kebijakan yang efektif, penghormatan terhadap warga negara dan institusi lain yang ikut membangun perekonomian dan sosial dalam negara.

Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan memperbaiki berbagai sistem yang berlaku saat ini, tetapi juga harus menyentuh para birokrat yang menjalankan sistem tersebut. Reformasi birokrasi memerlukan birokrat-birokrat yang berpikir inovatif, berani melakukan terobosan positif untuk perbaikan, dan memiliki visi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkualitas yang dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya aparatur pemerintah yang dapat membentuk birokrat seperti yang

diharapkan di atas.

Untuk menghasilkan diklat yang berkualitas tersebut, diperlukan suatu kemampuan untuk melakukan analisa kebutuhan Diklat untuk para perangcang program Diklat. Penyelenggaraan Diklat TNA dirasakan sangat penting untuk diselenggarakan agar perancangprogram Diklat dapat menentukan cara yang paling efektif dalam pengembangan sumberdaya aparatur yang diamanatkan dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Penyelenggaraan Diklat TNA bertujuan agar peserta Diklat dapat melakukan analisis kebutuhan Diklat di unit kerjanya masing-masing secara profesional.

2. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Diklat TNA adalah terwujudnya Perencana Diklat yang memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan kegiatan analisi kebutuhan Diklat.

C. Kompetensi

Kompetensi yang akan dibangun dalam penyelenggaraan Diklat TNA adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan sebagai perencana Diklat. Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab perencana Diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah kemampuan:

- 1. menjelaskan kebijakan Diklat aparatur;
- 2. mengidentifikasi kebutuhan organisasi saat ini dan yang akan datang;
- 3. menetapkan standar kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi;
- 4. menganalisis dan menetapkan standar kinerja yang dibutuhkan organisasi;
- 5. menggunakan teknik analisis diskrepansi;
- 6. menggunakan teknik analisis Difficulties Importance Frequency (DIF);
- 7. mampu menyusun laporan hasil rekomendasi; dan
- 8. mengaktualisasi kompetensi teknis AKD di organisasinya.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM, MATA DIKLAT DAN RINGKASAN MATERI

A. Struktur Kurikulum

Sesuai dengan kompetensi yang diperlukan bagi perencana Diklat, maka struktur Diklat bagi perencana Diklat terdiri atas tiga kelompok yaitu wawasan, kemampuan inti, dan aktualisasi.

1. Kelompok Wawasan

Kelompok wawasan ini diarahkan pada pemahaman peserta terkait dengan dengan kebijakan manajemen sumber daya aparatur, manajemen pengembangan sumber daya aparatur, serta kebijakan perencanaan Diklat aparatur.

2. Kelompok Kemampuan

Kelompok kemampuan ini dimaksudkan agar para peserta mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan organisasi; menetapkan target kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi; menganalisis dan menetapkan standar kompetensi pegawai yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja organisasi; menggunakan teknik analisis diskrepansi dan teknik analisis *Difficulties Importance Frequency* (DIF); serta mampu menyusun laporan hasil rekomendasi.

3. Kelompok Aktualisasi.

Kelompok aktualisasi ini dimaksudkan untuk membekali peserta dalam melakukan praktik analisis kebutuhan Diklat di instansinya masing-masing dengan output berupa rencana tindak lanjut.

B. Mata Diklat

Susunan Mata Diklat pada struktur kurikulum Diklat analisis kebutuhan Diklat adalah:

1. Kelompok wawasan

Mata Diklat untuk kelompok ini adalah Kebijakan Diklat Aparatur;

2. Kelompok Kemampuan

Mata Diklat untuk kelompok ini adalah:

- a. Peranan Kompetensi dalam Organisasi;
- b. Standar Kinerja Organisasi;
- c. Standar Kinerja Pegawai;
- d. Teknik Analisis Diskrepansi;
- e. Teknik Analisis Difficulties Importance Frequency (DIF);
- f. Penyusunan Laporan dan Teknik Presentasi;

3. Kelompok Aktualisasi

Mata Diklat untuk kelompok ini adalah Rencana Aksi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat dan Seminar.

Disamping kelompok pembelajaran di atas, peserta juga menerima Pengarahan Program, dan *Building Learning Commitment* sebagai bagian integral dari metodologi pembelajaran pada Diklat TNA.

C. Jumlah Jam Pembelajaran

Jumlah jam pembelajaran untuk program TNA adalah 69 JP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Mata Diklat	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)
1.	Kebijakan Diklat Aparatur	3
2.	Peranan Kompetensi dalam Organisasi	6
3.	Standar Kinerja Organisasi	6
4.	Standar Kinerja Pegawai	9
5.	Teknik Analisis Diskrepansi	9
6.	Teknik Analisis Difficulties Importance Frequency (DIF)	9
7.	Penyusunan Laporan dan Teknik Presentasi	9
8.	Rencana Aksi Pelaksanaan AKD dan Seminar.	9
9.	Pengarahan Program	3
10.	Building Learning Commitment	6
Jumlah		69

D. Ringkasan Materi

Mata – mata Diklat pada struktur kurikulum dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kelompok Wawasan

a. Kebijakan Diklat Aparatur

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menguraikan Perencanaan Diklat Aparatur melalui pembelajaran kebijakan Diklat Aparatur, Tujuan Diklat Aparatur, Strategi Kebijakan Diklat Aparatur, dan Kebijakan Perencanaan Diklat Aparatur. Pembelajaran disajikan secara interaktif melalui metode ceramah tanya interaktif, jawab, diskusi kelas dan curah pendapat. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan Kebijakan Perencanaan Diklat Aparatur secara baik dan benar.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan Kebijakan Diklat Aparatur secara baik dan benar.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan:

- a) menjelaskan kebijakan Diklat;
- b) menerangkan tujuan Diklat;
- c) mengelaborasi strategi mencapai tujuan Diklat;
- d) menjelaskan kebijakan perencanaan Diklat.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata Diklat ini adalah:

- a) Konsepsi Kebijakan Diklat Aparatur
- b) Tujuan Diklat Aparatur
- c) Strategi Kebijakan Diklat
- d) Kebijakan Perencanaan Diklat

5) Metode

Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah:

- a) Ceramah;
- b) Tanya Jawab;
- c) Diskusi kelas;
- d) Curah pendapat/brainstorming.

6) Media

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah:

- a) Modul:
- b) Bahan Tayang.